

MODEL KEPEMIMPINAN STRATEGIS DALAM MENGHADAPI RADIKALISME DAN TERORISME

Doly Andhika Putra^{1*}, Andriyas Rulloh²

^{1,2} Universitas Pertahanan Republik Indonesia
doly17andhika@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 3 Desember 2023

Page: 508-519

Article History:

Received: 09-12-2023

Accepted: 14-12-2023

Abstrak : Penelitian ini menyelidiki dampak signifikan dari model kepemimpinan strategis dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, dua tantangan global yang telah mengubah dinamika keamanan dan stabilitas dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran model kepemimpinan strategis dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme. Melalui pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis empat model kepemimpinan utama: kepemimpinan transformasional, situasional, partisipatif, dan berbasis kecerdasan emosional. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satu model kepemimpinan yang superior dalam semua situasi. Sebaliknya, pemimpin yang efektif dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme adalah mereka yang mampu mengintegrasikan aspek dari setiap model ini sesuai dengan kebutuhan situasional dan konteks sosial. Pendekatan kepemimpinan yang holistik dan adaptif diperlukan untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dari radikalisme dan terorisme. Studi ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya pendekatan kepemimpinan yang beragam dalam menghadapi isu-isu keamanan global yang kritis ini.

Kata Kunci : Kepemimpinan Strategis, Radikalisme, Terorisme

PENDAHULUAN

Terorisme, fenomena global yang mendapat sorotan tajam pasca peristiwa 11 September 2001, telah lama menjadi masalah kritis yang mengganggu stabilitas dan keamanan dunia. Peristiwa tragis runtuhnya menara kembar World Trade Centre di New York dan serangan terhadap Pentagon di Washington, sebagaimana dijelaskan oleh Mahajan (2022), bukan hanya simbol dari serangan terhadap ekonomi dan pertahanan Amerika Serikat, tetapi juga sebuah titik balik dalam persepsi global terhadap ancaman terorisme. Peristiwa 11 September tidak hanya mengubah cara dunia memandang terorisme, tetapi juga bagaimana negara-negara menyusun strategi

untuk melawannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bruce Hoffman (2017) dalam bukunya "*Inside Terrorism*", serangan tersebut memicu perubahan signifikan dalam taktik dan metode terorisme, dengan kelompok teroris semakin memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka. Serangan 11 September, dengan kehancuran besar-besaran dan jumlah korban yang tinggi, menunjukkan bahwa terorisme kini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Selain itu, peristiwa 11 September juga telah mengubah pendekatan kebijakan keamanan di banyak negara. Menurut Michael Chertoff (2009), mantan Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, dalam bukunya "*Homeland Security: Assessing the First Five Years*", ada peningkatan fokus pada kerjasama intelijen dan keamanan internasional. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan tradisional dalam melawan terorisme menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Dalam konteks lebih luas, dampak dari serangan 11 September telah membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan global. Seperti yang dijelaskan oleh Fawaz Gerges (2005) dalam bukunya "*The Far Enemy: Why Jihad Went Global*", serangan tersebut telah memaksa negara-negara untuk merekonfigurasi strategi mereka dalam menghadapi ancaman global dan transnasional seperti terorisme.

Di Indonesia, pergeseran dalam strategi terorisme juga terlihat jelas. Seperti dijelaskan oleh Sidney Jones, direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), dalam sebuah wawancara dengan The Jakarta Post pada tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatasi radikalisme yang kian berkembang di dalam negeri, yang dipengaruhi oleh perubahan global dalam taktik terorisme. Tantangan ini tidak hanya bersumber dari kelompok teroris yang sudah ada, tetapi juga dari individu-individu yang terpapar ideologi ekstremis melalui internet dan media sosial. Seringkali, agama dijadikan sebagai kambing hitam dalam setiap tragedi terorisme, padahal semua agama yang ada di Indonesia dengan tegas menolak aksi terorisme. Khoirun Amin (2018) menekankan bahwa terorisme saat ini bukan hanya sebuah ancaman yang jauh, tetapi telah menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat, baik melalui ancaman langsung terhadap keamanan maupun dampak psikologis yang mendalam.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi radikalisme dan terorisme tidak hanya terkait dengan penangkapan dan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dalam mengatasi akar masalah yang lebih dalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Solahudin (2013), seorang ahli terorisme dan penulis buku "*The Roots of Terrorism in Indonesia*", radikalisme di Indonesia tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika internal yang melibatkan sejarah, politik, dan perubahan sosial di dalam negeri.

Salah satu aspek penting yang sering diabaikan dalam penanggulangan terorisme adalah peran masyarakat dan pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Noor Huda Ismail, pendiri Institute for International Peace Building di Jakarta, pendekatan holistik yang melibatkan edukasi dan pemahaman kritis terhadap narasi-narasi ekstremis adalah kunci dalam memerangi radikalisme. Ismail menekankan pentingnya mendidik masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami dan menolak ideologi ekstremis. Lebih lanjut, tantangan dalam menghadapi terorisme di Indonesia juga terkait dengan penggunaan media sosial dan internet.

Faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya terorisme secara global, menurut Winarno (2011) mencakup kemajuan di bidang transportasi dan teknologi informasi, serta peran media dalam menyebarkan informasi terorisme. Kemajuan ini, meskipun memiliki banyak manfaat, juga telah memberikan peluang bagi teroris untuk menyebarluaskan jaringan dan ideologi mereka secara lebih luas dan efisien. Djelantik (2010) menambahkan bahwa perangkat teknologi modern memungkinkan teroris untuk merahasiakan komunikasi dan pergerakan mereka, membuat deteksi dan pencegahan menjadi lebih sulit. Di Indonesia, Azca (2013) mengidentifikasi faktor-faktor seperti dinamika sosial politik, transformasi gerakan radikal Islam, dan tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda sebagai pendorong utama radikalisme. Dalam konteks ini, solusi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang latar belakang sosial dan ekonomi yang mendorong individu ke arah radikalisme.

Kepemimpinan strategis dalam menghadapi tantangan ini tidak hanya melibatkan pemberantasan kekerasan, tetapi juga pengembangan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh David Kilcullen (2015) dalam bukunya *"Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla"*, pendekatan modern dalam melawan terorisme memerlukan kombinasi dari taktik militer, kebijakan sosial-ekonomi, dan kerjasama intelijen internasional. Artikel ini, dengan mengkaji berbagai model kepemimpinan strategis, bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teori-teori kepemimpinan yang relevan dapat diaplikasikan dalam konteks radikalisme dan terorisme. Strategi pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi yang efektif sering kali memerlukan pendekatan multidisipliner, melibatkan tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga para ahli di bidang pendidikan, psikologi, dan sosial.

Selanjutnya, artikel ini juga akan menyoroti peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme. Seperti yang diungkapkan oleh Stern & Berger (2016) dalam bukunya *"ISIS: The State of Terror"* (2015), keterlibatan masyarakat dalam program deradikalisasi dan rehabilitasi adalah kunci dalam memerangi ideologi ekstremis. Pendekatan ini menuntut pemimpin yang mampu menginspirasi dan memobilisasi masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan solusi konkret bagi pemimpin, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika radikalisme dan terorisme, serta penerapan model kepemimpinan strategis yang tepat, diharapkan akan ditemukan jalan keluar yang efektif untuk mengatasi masalah kompleks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan detail mengenai model kepemimpinan strategis yang efektif dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Sesuai dengan penjelasan Moleong (2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk menginterpretasi peristiwa dalam lingkungan alamnya, memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan mendalam terhadap fenomena yang diamati. Sedangkan, penelitian deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018), bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang situasi atau fenomena yang

diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji model kepemimpinan strategis dalam konteks yang spesifik, yaitu menghadapi radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan topik penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Irawan (2007), yang menyatakan bahwa metode deskriptif memungkinkan penelitian untuk mengkaji data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Menurut Zed (2014), pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Ini mencakup pengkajian terhadap berbagai sumber yang relevan dan kontemporer, termasuk buku, artikel internet, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan model kepemimpinan strategis, radikalisme, dan terorisme. Proses ini melibatkan pencarian literatur yang dipublikasikan hingga tahun 2023, dengan fokus khusus pada karya-karya yang memberikan wawasan tentang strategi kepemimpinan dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Dialektika dibangun melalui proses review kritis terhadap literatur yang dipilih. Proses ini mencakup reduksi data, memilih informasi yang paling relevan dan bermanfaat untuk topik penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah analisis komprehensif tentang bagaimana model kepemimpinan strategis dapat diterapkan dalam konteks radikalisme dan terorisme.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik-praktik kepemimpinan strategis yang efektif dalam menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman model kepemimpinan strategis yang dapat diterapkan dalam situasi krisis, serta memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan kebijakan dan praktik kepemimpinan dalam konteks global yang ditandai dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme, sebagaimana didefinisikan oleh Kalidjernih (2010), adalah komitmen untuk perubahan menyeluruh yang menantang struktur dasar atau fundamental suatu sistem, bukan hanya pada lapisan-lapisan superfisial. Sartono Kartodirdjo (1985) mendefinisikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tatanan sosial yang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Dalam konteks keagamaan, Rubaidi (2007) melihat radikalisme sebagai gerakan keagamaan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan Hasani & Naipospos (2010) dalam studi Ilmu Sosial, mengartikan radikalisme sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Baidhowi (2017) membedakan antara 'radikal', yang berkonotasi baik atau netral sebagai perubahan mendasar dan esensial, dengan 'radikalisme', yang lebih merujuk pada tindakan keras, ekstrem, dan anarkis dengan

implikasi negatif. Emna Laisa (2014) menekankan dampak nyata dari radikalisme, yaitu politisasi agama. Radikalisme berpotensi memicu fanatisme dan tindakan keras dalam kehidupan sosial, baik antarindividu maupun kelompok, mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok Islam radikal.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror adalah kegiatan yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme, sebagai bentuk lanjutan dari teror, didefinisikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995) sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Hukum Positif Indonesia, melalui UU No. 15 Tahun 2003, menegaskan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, seringkali menargetkan korban massal dan objek-objek vital. Muladi (2002) menyatakan bahwa terorisme sering kali menargetkan korban yang tidak bersalah, dengan maksud menciptakan sensasi dan menarik perhatian masyarakat luas terhadap tujuan-tujuan sosial atau politik yang diperjuangkan oleh para pelaku.

Terorisme saat ini telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir dengan jaringan luas, mengancam perdamaian dan keamanan baik nasional maupun internasional. Hal ini memperlihatkan kompleksitas dan urgensi masalah radikalisme dan terorisme, yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan kolaboratif antarnegara untuk menanganinya.

2. Pola Perkembangan Radikalisme di Indonesia dari Waktu ke Waktu

a. Periode 1945-1965 (Orde Lama)

Periode Orde Lama, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965, adalah fase kritis dalam sejarah Indonesia yang menandai awal mula gerakan radikal di negara ini. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) muncul sebagai respons terhadap penolakan nasionalis Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Menurut Sulasmono (2002), gerakan DI/TII, yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo, mencerminkan ketegangan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Kartosoewiryo, dengan obsesinya mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), menunjukkan adanya konflik ideologi yang mendalam. Periode ini ditandai dengan serangkaian pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh DI/TII di berbagai wilayah Indonesia. Konflik ini tidak hanya merupakan pertarungan senjata, tetapi juga pertarungan ideologi antara konsep negara sekuler dan negara berdasarkan syariat Islam.

Pemerintah Indonesia, dalam upayanya mempertahankan keutuhan negara, berhasil menumpas gerakan DI/TII pada tahun 1962 dengan penangkapan Kartosoewiryo. Namun, seperti yang dicatat oleh Abegebriel (2004), penumpasan gerakan ini tidak sepenuhnya menghapus ideologi radikal yang mereka bawa. Aktivis DI/TII seperti Ajengan Masduki, Abdullah Sungkar, dan Abu Bakar Ba'asyir, melanjutkan perjuangan Kartosoewiryo dengan mendirikan al-Jama'ah al-Islamiyyah (JI), yang kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi teroris paling berpengaruh di Indonesia.

Gerakan DI/TII dan upayanya mendirikan NII memiliki dampak jangka panjang terhadap dinamika radikalisme di Indonesia. Menurut para ahli, meskipun DI/TII dapat ditumpas, semangat dan ideologi yang mereka bawa terus

hidup dan berkembang, beradaptasi dengan perubahan zaman dan konteks sosial-politik Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya mengatasi akar masalah radikalisme, tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan sosial dan ideologis.

b. Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)

Masa Orde Baru, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, ditandai sebagai era stabilisasi politik dan penguatan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarawan seperti Ricklefs (1993) mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia berhasil mengukuhkan ideologi Pancasila untuk menangkal pengaruh komunisme dan gerakan radikal lainnya. Pancasila dijadikan sebagai dasar yang menekankan pada persatuan dan keragaman, sebagai strategi untuk mengatasi keretakan sosial dan politik.

Selama periode ini, pemerintah Orde Baru dengan efektif menekan gerakan-gerakan radikal dan terorisme. Menurut Crouch (1978), penekanan ini dilakukan melalui penguatan fungsi keamanan dan stabilitas politik, termasuk kebijakan Dwi Fungsi ABRI yang memperkuat peran militer dalam aspek kehidupan politik dan sosial. Pendekatan ini berhasil mempertahankan keutuhan negara namun sering kali melalui metode yang otoriter.

Meskipun berhasil menekan gerakan radikal dan terorisme, periode Orde Baru juga ditandai dengan munculnya konflik kedaerahan dan sentimen antardaerah. Vatikiotis, (1998) menyebutkan bahwa kebijakan sentralistik pemerintah sering kali menimbulkan ketidakpuasan di daerah-daerah, yang berujung pada konflik lokal. Namun, melalui penerapan kebijakan politik dan keamanan yang ketat, konflik-konflik ini umumnya dapat dikendalikan.

Dalam konteks terorisme, masa Orde Baru mengalami bentuk terorisme yang berbeda dari era reformasi. Seperti dijelaskan oleh Kingsbury (2005), terorisme pada masa ini lebih banyak berbentuk gerakan pengacau keamanan bersenjata dan cenderung terlokalisasi. Terorisme belum memiliki jaringan yang luas dan terorganisir seperti pada periode reformasi, tetapi lebih terfokus pada isu-isu lokal dan seringkali berkaitan dengan sentimen kedaerahan.

Masa Orde Baru merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia dalam hal penanganan radikalisme dan terorisme. Kebijakan yang diambil pemerintah saat itu berhasil dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara, namun dengan cara yang sering kali otoriter. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pendekatan yang seimbang antara keamanan dan hak-hak politik dan sosial dalam mengatasi masalah radikalisme dan terorisme.

c. Periode 1999 – hingga kini (Reformasi)

Era Reformasi, dimulai pada tahun 1999, menandai perubahan besar dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Menurut Aspinall (2005), periode ini ditandai dengan transisi politik dari otoritarianisme ke demokrasi, yang membawa tantangan baru dalam hal stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Ketidakstabilan ini sering kali dijadikan kesempatan oleh kelompok radikal untuk memperkuat pengaruh mereka.

Perubahan yang signifikan juga terjadi dalam dinamika terorisme. Sidney Jones (2003), seorang pakar terorisme dan konflik, mencatat bahwa terorisme selama era Reformasi ditandai dengan penggunaan teknologi canggih dan

jaringan internasional. Serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi contoh penting bagaimana terorisme global menggunakan media dan teknologi untuk menciptakan ketakutan secara luas. Era Reformasi juga mencatatkan kemunculan berbagai kelompok teroris dengan modus operandi yang lebih canggih. Menurut analisis keamanan, seperti Rohan Gunaratna (2002), kelompok teroris seperti Jemaah Islamiyah dan kelompok-kelompok afiliasinya menunjukkan bagaimana terorisme telah bertransformasi menjadi lebih terorganisir dan memiliki jaringan yang lebih luas. Tindakan terorisme tidak lagi terbatas pada pelaku lokal, tetapi juga melibatkan pelaku dari negara lain.

Tantangan dalam menangani terorisme selama era Reformasi menjadi lebih kompleks. Menurut Ismail (2006), pendiri Institute for International Peace Building di Jakarta, strategi penanganan terorisme harus melampaui pendekatan militer dan keamanan, melibatkan aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Era Reformasi membawa perubahan paradigma dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan politik, strategi penanganan harus diadaptasi untuk menghadapi bentuk-bentuk baru terorisme yang lebih terorganisir dan terkoneksi secara global. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai sektor masyarakat dan pemerintah dianggap penting untuk mengatasi tantangan ini.

3. Model Kepemimpinan Strategis dalam Menghadapi Radikalisme dan Terorisme

a. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional, seperti yang didefinisikan oleh Burns (1978), adalah pendekatan yang mengubah dan mengangkat motivasi, moral, dan kinerja pengikut melalui serangkaian mekanisme. Ini termasuk menghubungkan identitas pengikut dengan misi dan identitas organisasi, mendorong mereka untuk berkontribusi lebih dari yang diharapkan, dan memfokuskan pada kepentingan kolektif. Bass (1985) kemudian memperluas konsep ini dengan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk membangun kepercayaan dalam memimpin transformasi.

Dalam konteks radikalisme dan terorisme, kepemimpinan transformasional memainkan peran penting. Sebagai contoh, pemimpin transformasional dapat menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai yang menolak ideologi radikal. Mereka melakukan ini dengan menciptakan visi yang inklusif dan memperkuat rasa pemberdayaan di kalangan masyarakat. Bass (1985) menekankan bahwa pemimpin transformasional efektif dalam "merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa dan, dalam prosesnya, mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri."

Pemimpin transformasional harus mampu membangun kepercayaan, yang krusial dalam menghadapi ketidakpastian dan ketakutan yang ditimbulkan oleh terorisme. Mereka harus berkomunikasi dengan jelas dan konsisten, menunjukkan empati, dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bass & Avolio (1994), "Kepemimpinan transformasional mencakup menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi individu."

Pendekatan transformasional juga melibatkan mendorong perubahan sosial melalui visi bersama. Pemimpin harus mempromosikan nilai-nilai yang bersifat inklusif dan universal, mendorong toleransi dan keragaman. Yukl (2013) menunjukkan bahwa "Kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan koherensi sosial dan mengurangi polarisasi yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal."

Kepemimpinan transformasional dalam konteks radikalisme dan terorisme memerlukan lebih dari sekadar pengambilan keputusan strategis; ini tentang menginspirasi dan memotivasi perubahan dalam individu dan masyarakat. Melalui pembangunan kepercayaan, komunikasi yang efektif, dan penciptaan visi yang inklusif, pemimpin transformasional dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi ideologi radikal dan mempromosikan keharmonisan sosial.

b. Kepemimpinan Situasional

Teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey et al., (1996) mengemukakan bahwa pemimpin efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan tingkat kematangan pengikut dan kebutuhan situasional. Dalam konteks terorisme, ini berarti pemimpin harus memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas untuk menanggapi berbagai situasi keamanan dan dinamika sosial yang berubah.

Menanggulangi terorisme memerlukan pendekatan yang beragam tergantung pada situasi dan konteksnya. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan situasional memahami kapan harus menerapkan pendekatan yang lebih otoriter, seperti dalam situasi krisis yang memerlukan keputusan cepat dan tegas, dan kapan harus menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif, seperti dalam pengembangan program deradikalisasi dan pencegahan. Blanchard et al., (1985) menekankan pentingnya "diagnostik situasional" dalam menentukan gaya kepemimpinan yang paling tepat.

Pemimpin situasional juga mampu merespons secara efektif terhadap dinamika sosial yang kompleks yang sering mengelilingi masalah terorisme. Menurut Yukl (2013), pemimpin harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat terhadap terorisme dan strategi kontraterorisme.

Dalam mengembangkan program deradikalisasi dan pencegahan, pemimpin situasional harus terlibat secara aktif dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Menurut Northouse (2004), pendekatan partisipatif dalam kepemimpinan situasional memungkinkan pemimpin untuk lebih efektif dalam membangun konsensus dan mendukung inisiatif yang dirancang untuk mencegah radikalisasi.

Kepemimpinan situasional dalam konteks terorisme menuntut pemimpin untuk fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Dengan menerapkan pendekatan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan situasional dan tingkat kematangan pengikut, pemimpin dapat lebih efektif dalam mengatasi ancaman terorisme dan mendorong upaya deradikalisasi dan pencegahan.

c. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif, sebagaimana didefinisikan oleh Lewin et al., (1939), menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan masukan dari berbagai pengikut atau anggota tim. Dalam konteks menanggulangi radikalisme dan terorisme, gaya kepemimpinan ini sangat berharga karena mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan.

Pemimpin partisipatif memahami bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan terhadap masalah radikalisme dan terorisme. Seperti yang diungkapkan oleh Noor Huda Ismail (2015), "Pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam menanggulangi radikalisme dapat menghasilkan solusi yang lebih tahan lama dan lebih akar rumput." Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Kepemimpinan partisipatif juga melibatkan membangun konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan dan mendukung inisiatif dari bawah ke atas. Menurut Greenleaf, (1997), yang mengembangkan konsep 'servant leadership' yang berkaitan erat dengan kepemimpinan partisipatif, pemimpin harus berfokus pada pelayanan terhadap pengikutnya, memprioritaskan kebutuhan mereka, dan mendukung inisiatif mereka dalam menanggulangi masalah.

Pemimpin partisipatif responsif terhadap kebutuhan dan masukan dari masyarakat. Mereka berusaha memahami berbagai perspektif dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam menanggulangi radikalisme. Yukl (2013) menekankan bahwa kepemimpinan partisipatif efektif dalam situasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan pengikut. Dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme, kepemimpinan partisipatif menawarkan pendekatan yang mempromosikan kolaborasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, pemimpin dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas yang mereka layani.

d. Kepemimpinan Berbasis Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Goleman (1995), melibatkan kapasitas untuk mengenali perasaan sendiri dan orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam konteks terorisme, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat lebih efektif dalam merespons secara sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan masyarakat, serta mengatasi ketakutan dan ketidakpastian yang sering ditimbulkan oleh terorisme.

Salah satu aspek penting dari kecerdasan emosional adalah empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Mayer et al., (2004) menekankan bahwa empati memungkinkan pemimpin untuk lebih baik dalam memahami kekhawatiran dan ketakutan masyarakat yang mereka layani. Ini sangat penting dalam situasi yang melibatkan terorisme, di mana ketakutan dan prasangka dapat meningkat.

Pengaturan diri, aspek lain dari kecerdasan emosional, penting dalam pengelolaan stres dan ketidakpastian. Pemimpin yang dapat mengatur emosi mereka sendiri dapat membuat keputusan yang lebih tenang dan rasional dalam situasi krisis. Selain itu, keterampilan sosial yang baik memungkinkan pemimpin untuk mengelola dan membangun hubungan yang efektif, mempromosikan kerja sama dan kepercayaan di antara anggota masyarakat (Bar-On, 2006).

Kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional juga berarti pemimpin harus responsif terhadap kebutuhan emosional masyarakat. Dalam mengatasi dampak psikologis dari terorisme, penting bagi pemimpin untuk menunjukkan empati dan dukungan, serta bekerja untuk membangun rasa aman dan ketenangan di masyarakat. Kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional adalah aset penting dalam mengatasi tantangan terorisme. Kemampuan untuk mengelola emosi, baik secara internal maupun dalam hubungan sosial, memungkinkan pemimpin untuk merespons secara efektif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme. Pendekatan ini membantu membangun kepercayaan dan kerjasama, serta mendukung kesejahteraan emosional masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme, pentingnya model kepemimpinan strategis yang efektif tidak dapat diabaikan. Artikel ini telah mengeksplorasi empat model kepemimpinan—transformasional, situasional, partisipatif, dan berbasis kecerdasan emosional—yang masing-masing menawarkan perspektif unik dalam mengatasi isu ini. Kepemimpinan transformasional, dengan fokusnya pada inspirasi dan motivasi, mendorong masyarakat untuk melampaui ekspektasi dan menolak ideologi radikal dengan merangkul visi yang inklusif dan pemberdayaan. Di sisi lain, kepemimpinan situasional menekankan pada adaptabilitas dan fleksibilitas, memungkinkan pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka berdasarkan dinamika sosial dan keamanan yang berubah-ubah. Kepemimpinan partisipatif, yang menonjolkan pentingnya keterlibatan dan masukan dari masyarakat, mendukung pendekatan yang berakar pada kebutuhan lokal dalam mengatasi radikalisme. Sementara itu, kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional memainkan peran kunci dalam mengelola aspek emosional yang ditimbulkan oleh terorisme, dengan menekankan empati, pengaturan diri, dan keterampilan sosial.

Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa dalam menghadapi kompleksitas radikalisme dan terorisme, tidak ada satu model kepemimpinan yang dapat diandalkan secara eksklusif. Sebaliknya, pendekatan yang efektif memerlukan integrasi dari berbagai aspek model kepemimpinan ini, disesuaikan dengan situasi dan konteks yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam menghadapi radikalisme dan terorisme membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang isu, kemampuan berkomunikasi dan membangun kepercayaan, serta fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kondisi yang selalu berkembang. Pendekatan kepemimpinan yang holistik dan adaptif ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis dari radikalisme dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abegebriel, A. M. (2004). *Ada Apa Dengan Dokumen JI? Sebuah Penghampiran Hermeneutik, dalam Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*. SR-Ins Publishing.
- [2] Amin, K. (2018). Isis Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerjasama Kawasan dalam Menghaddapi peningkatan ekspansi ISIS. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2).
- [3] Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia Edward Aspinall. Contemporary issues in Asia and the Pacific East-West Center series on contemporary issues in Asia and the Pacific*. Stanford University Press.
- [4] Azca, M. N. (2013). Yang Muda Yang Radikal Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Maarif*, 8(1), 14.
- [5] Baidhowi. (2017). Islam tidak radikalisme dan terorisme. *Law Research Review Quarterly*, 3(1), 197–218.
- [6] Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). *Psicothema*, 18, 13–25.
- [7] Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. Free Press.
- [8] Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership* (1st Editio). Sage Publications, Inc.
- [9] Blanchard, K., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (1985). *Leadership and the One Minute Manager: Increasing Effectiveness Through Situational Leadership*. William Morrow.
- [10] Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Cambridge University Press.
- [11] Chertoff, M. (2009). *Homeland Security: Assessing the First Five Years*. University of Pennsylvania Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt3fhgnj>
- [12] Crouch, H. A. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- [13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedu). Balai Pustaka.
- [14] Djelantik, S. (2010). *Terorisme: tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- [15] Gerges, F. A. (2005). *The Far Enemy: Why Jihad Went Global* (First Edit). Cambridge University Press.
- [16] Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam Books, Inc.
- [17] Greenleaf, R. K. (1997). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Paulist Press.
- [18] Gunaratna, R. (2002). *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/guna12692>
- [19] Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Pustaka Masyarakat Setara.
- [20] Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1996). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Prentice Hall.
- [21] Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press.
- [22] Irawan, P. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.

DIA Fisip UI.

- [23] Ismail, N. H. (2006). The Role of Kinship in Indonesia's Jemaah Islamiya. *Terrorism Monitor*, 4(11).
- [24] Jones, S. (2003). *Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous*. International Crisis Group.
- [25] Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politik*. Widya Aksara Press.
- [26] Kartodirdjo, S. (1985). *Ratu Adil*. Sinar Harapan.
- [27] Kilcullen, D. (2015). *Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla Reprint Edition* (Reprint). Oxford University Press.
- [28] Kingsbury, D. (2005). *The Politics of Indonesia*. (Third edit). Oxford University Press.
- [29] Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. *Jurnal Islamuna*, 1(1), 2.
- [30] Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created "Social Climates." *Journal of Social Psychology*, 10, 271–301.
- [31] Mahajan, R. (2022). *Perang Salib Baru: Amerika Melawan terorisme atau Islam*. Serambi Ilmu Semesta.
- [32] Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional Intelligence: Theory, Findings, and Implications. *Psychological Inquiry*, 15(3), 197–215. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02
- [33] Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kuantatif*. Remaja Rosdakarya.
- [34] Muladi. (2002). Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 172.
- [35] Northouse, P. g. (2004). *Leadership :Theory and Practice*. Sage Publications.
- [36] Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia Since C. 1300* (2nd Editio). Stanford Univ Press.
- [37] Rubaidi. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka.
- [38] Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. NewSouth Publishing.
- [39] Stern, J., & Berger, J. M. (2016). *ISIS: The State of Terror*. William Collins.
- [40] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [41] Sulasmono, B. (2002). *Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila: Materi Pendidikan Pancasila*. P3KD Jurusan Studi PPKn.
- [42] Vatikiotis, M. R. J. (1998). *Indonesian politics under Suharto the rise and fall of the new order* (Third edit). Routledge. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20376855&lokasi=lokal>
- [43] Winarno, B. (2011). *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS.
- [44] Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th Editio). Pearson.
- [45] Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.